

## **ABSTRAK**

Aksesibilitas merupakan kewajiban yang disediakan oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dalam penyelenggara kegiatan Negara yang ditujukan bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Baik secara fisik normal maupun yang tidak normal, di Kota Bandung semua akses bagi masyarakatnya sudah terealisasi, termasuk aksesibilitas yang ditujukan bagi orang-orang difabel, akses yang ditujukan bagi difabel masih kurang perhatian dari pemerintah Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses, faktor penghambat dan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan aksesibilitas ramah difabel.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan (1) ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumberdaya (3) karakteristik agen pelaksana (4) sikap agen pelaksana (5) komunikasi antar organisasi (6) lingkungan ekonomi social dan politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpul melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan verifikasi atau simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik dan masih banyak dibeberapa titik kota yang belum tersedia aksesibilitas bagi penyandang cacat serta masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap orang-orang penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Implementasi Kebijakan, Ramah Difabel.